

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Pada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2023)

Oleh:

Muhammad Rivandi¹

Silvia Armayeni²

STIE KBP Padang

Alamat: JL. Khatib Sulaiman No.61, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat (25173).

Korespondensi Penulis: muhammadrivandi@akbpstie.ac.id

Abstract. *The Pesisir Selatan Regency Government has intensified various efforts and activities to advance the tourism sector because it is considered to have the potential to contribute to levies as income and in the process of absorbing labor. However, the rapid development of the tourism industry will have an impact on the income earned by the region, especially in the tourism sector. However, we can see in the regional levies section, the total regional levy revenue in 2020 experienced a significant decline with a percentage value reaching 56% when compared to 2019. However, Pesisir Selatan Regency's regional levy revenue will always increase until 2022. The cause of the low regional levy income in Pesisir Selatan Regency in 2020 is the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which is a continuation of efforts to prevent the spread of the Covid-19 pandemic. This has caused all activities in Pesisir Selatan Regency to temporarily stop, both activities from the economic sector and from the tourism sector which has potential in the area.*

Keyword: *Contribution of Tourism Sector Levy, Regional Original Income.*

Abstrak. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengencangkan berbagai usaha dan kegiatan dalam memajukan sektor pariwisata karena dinilai mempunyai potensi dalam menyumbangkan kontribusi retribusi sebagai pendapatan serta dalam proses penyerapan

Received April 14, 2024; Revised April 28, 2024; May 06, 2024

*Corresponding author: muhammadrivandi@akbpstie.ac.id

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

tenaga kerja. Namun pesatnya perkembangan industri pariwisata akan berdampak terhadap pendapatan yang diperoleh daerah tersebut khususnya di sektor pariwisata. Meskipun demikian, dapat kita lihat pada bagian retribusi daerah, total pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 mengalami penyusutan yang signifikan dengan nilai persentase mencapai 56% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Walaupun demikian, penerimaan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Adapun penyebab rendahnya pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 yaitu adanya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan upaya lanjutan dari pencegahan penyebaran wabah pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat seluruh aktivitas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terhenti sementara, baik itu aktivitas dari sektor perekonomian maupun dari sektor pariwisata yang memiliki potensi di daerah tersebut.

Kata Kunci: Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Pada saat menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan otoritas dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang ditandai dengan adanya pelimpahan kekuasaan secara desentralisasi. Daerah otonom berhak dalam mengurus dan mengatur segala kewajiban pemerintahan daerah yang menganut pada aturan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya melalui pembelanjaan dari pemerintah pusat ke daerah yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya. Komponen-komponen tersebut menjadi penunjang dalam penerimaan daerah sesuai dengan Peraturan daerah (Perda) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu, PAD yang berperan penting sebagai sumber penerimaan daerah diharapkan mampu membiayai seluruh proses penyelenggaraan pemerintah daerah untuk masyarakat, terkhusus dalam penerimaan retribusi daerah sebagai bentuk penerimaan yang memberikan imbalan secara langsung kepada masyarakat (Mardiani, 2022)

Tabel 1.1 Realisasi PAD Kabupaten Pesisir Selatan 2014-2023 (Rupiah)

	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
2014	15.042.795.104	43.132.513.940	3.878.435.560	24.646.077.150
2015	14.420.466.230	6.195.033.270	4.107.566.970	422.296.391.180
2016	13.712.844.610	5.315.801.100	5.070.336.670	94.816.312.240
2017	19.794.773.400	3.739.647.500	5.410.693.490	227.658.855.930
2018	23.751.789.554	4.552.508.117	5.711.160.313	89.891.066.458
2019	23.797.657.255	5.535.119.948	8.395.930.840	97.075.886.905
2020	20.454.008.648	3.096.510.273	9.632.288.482	99.569.752.689
2021	21.915.236.928	3.686.867.311	8.220.222.551	111.206.566.610
2022	27.788.268.845	3.991.934.633	9.928.421.974	101.959.421.974
2023	28.395.740.410	3.541.700.380	11.016.313.390	107.277.972.350

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah PAD Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Meskipun demikian, dapat kita lihat pada bagian retribusi daerah, total pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 mengalami penyusutan yang signifikan dengan nilai persentase mencapai 56% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Walaupun demikian, penerimaan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Adapun penyebab rendahnya pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 yaitu adanya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan upaya lanjutan dari pencegahan penyebaran wabah pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat seluruh aktivitas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terhenti sementara, baik itu aktivitas dari sektor perekonomian maupun dari sektor pariwisata yang memiliki potensi di daerah tersebut.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai negeri sejuta pesona merupakan daerah yang memiliki banyak objek wisata serta potensi-potensi penerimaan daerah yang cukup besar untuk dapat dikembangkan. Penerimaan retribusi pariwisata menjadi hal yang paling menonjol sebagai sumber penerimaan daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Sektor pariwisata menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan serta menjadi sektor strategis

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

dalam upaya peningkatan perekonomian nasional ataupun daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengencangkan berbagai usaha dan kegiatan dalam memajukan sektor pariwisata karena dinilai mempunyai potensi dalam menyumbangkan kontribusi retribusi sebagai pendapatan serta dalam proses penyerapan tenaga kerja. Namun pesatnya perkembangan industri pariwisata akan berdampak terhadap pendapatan yang diperoleh daerah tersebut khususnya di sektor pariwisata (Gemon, 2019).

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Yang menjadi kriteria utama agar benar-benar mengevaluasi kapasitas suatu daerah untuk merumuskan serta mengelola anggarannya ialah kemampuannya untuk menerapkan *self supporting* di sektor keuangan. Mengingat krusialnya situasi keuangan tersebut, tanpa anggaran yang cukup untuk penyediaan dan pengembangan pelayanan, pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Penganggaran tersebut menjadi salah satu kriteria dasar dalam mengetahui dan memahami kapasitas sebenarnya yang dimiliki oleh daerah tersebut ketika mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada semua pendapatan yang diterima atas perekonomian asli daerah itu sendiri (Kusufi & Halim, 2014). Mardiasmo (2018) menjelaskan hal tersebut ialah pajak daerah, retribusi daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah, hasil pengelolaan aset daerah perseorangan, dan PAD lainnya yang sah.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, PAD merupakan penerimaan daerah yang diterima atas potensi-potensi daerah, baik itu yang berasal dari sektor retribusi, pajak atau penerimaan daerah lainnya yang dianggap sah serta dipergunakan untuk pembiayaan dan pengembangan daerah.

Faktor Penilai Penetapan Retribusi Daerah

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi penilai dan penentu dalam proses penetapan retribusi daerah yaitu:

a. Hasil

Sama halnya dengan pajak, retribusi mempunyai dua fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Retribusi *budgetair* merupakan retribusi yang

memperoleh penerimaan retribusi yang banyak, sedangkan retribusi *regulerend* merupakan retribusi yang tidak mempedulikan apakah perolehannya memadai atau tidak, namun yang diperhatikan ialah fungsinya dalam mengontrol dan mengendalikan berbagai hal.

b. Keadilan

Menurut Fans Magnis Suseno (1987), keadilan merupakan kondisi di mana antar manusia yang diperlakukan sama berdasarkan dari hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap sumber penerimaan yang ada pada setiap daerah harus jelas landasan implementasiannya serta pembayarannya dan tidak semena-mena. Sedangkan jika dirujuk dari segi orangnya, proses pelunasan retribusi didasarkan atas keadilan yang mencakup ketentuan mendatar dan menurun. Keadilan mendatar artinya beban retribusi sama atas beraneka ragam kelompok tetapi posisi ekonomi yang sama. Sedangkan keadilan menurun artinya kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata diwajibkan untuk memberikan kontribusi dan sumbangan yang besar dibandingkan kelompok yang termasuk ke dalam kategori yang tidak mampu

c. Efisiensi Ekonomi

Istilah yang dipakai untuk mengarah terhadap sejumlah prinsip yang berkaitan pada penggunaan semua sumber daya yang ada di suatu daerah. Pada dasarnya pajak daerah, retribusi daerah dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, karena pajak dan retribusi dapat mengambil hak pendapatan dari masyarakat. Akibatnya, perputaran uang yang seharusnya tumbuh dengan aktif menjadi pasif dan terhambat (Taufik Hidayat, dkk, 2021).

d. Kemampuan melaksanakan

Pemungutan retribusi dipandang dari sudut kesanggupan politis daerah dalam memungut retribusi, yaitu pengumpulan dari retribusi daerah didorong oleh semua lapisan masyarakat. Harus ada relasi yang kuat antara realisasi dan potensi penerimaan daerah. Semakin tinggi capaian realisasi dibandingkan dengan potensi pendapatannya mengindikasikan bahwa daerah tersebut mampu melakukan pemungutan dengan baik.

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

- e. Kesesuaian sebagai penerimaan daerah
Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal:
- i. Dibandingkan dengan daerah yang sejenis.
 - ii. Dibandingkan dengan daerah yang lebih tinggi.
- Dalam memungut retribusi terdapat tiga hal yang harus diperhatikan:
- i. Wajib retribusi;
 - ii. Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi; dan Aparat pemungut.

Jenis Retribusi Sektor Pariwisata

1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

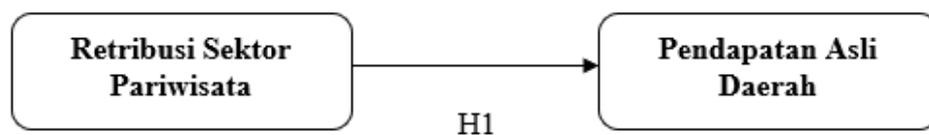
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, ada hal yang dikecualikan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang diolah oleh pemerintah, BUMD, BUMN serta sektor swasta.

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi penyediaan fasilitas tempat, penempatan dan penataan, keamanan dan ketertiban tempat khusus parkir. Yang dikenakan retribusi parkir khusus adalah orang perseorangan atau badan hukum yang wajib membayar retribusi parkir khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut atau pemungut retribusi parkir khusus. Biaya parkir khusus dihitung berdasarkan kategori seperti tempat parkir, jenis kendaraan, dan waktu penggunaan. Konsep dan tujuan penetapan struktur serta besaran retribusi parkir merupakan biaya administrasi, konstruksi dan peralatan, pengelolaan dan/atau pemeliharaan, keamanan, peraturan, pembersihan, penyusutan, asuransi dan instruksi. Retribusi Tempat Penginapan/Villa atau Pesanggrahan

Kerangka Pemikiran

Agar lebih mendalami dan memahami masalah yang ditelaah, maka diperlukan kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian terhadap suatu pokok permasalahan yang tak lain agar ditemukan kebenaran dari permasalahan yang dibahas. Dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang banyak memiliki tempat pariwisata, maka perlu ditemukan efektivitas, kontribusi, dan efisiensi dan retribusi Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Merupakan salah satu bentuk penelitian data yang mengakomodasi penggambaran, pendemonstrasikan, ataupun peringkasan poin-poin suatu data sehingga pola-pola yang dibuat dapat berkembang yang telah memenuhi syarat data (Ghozali, 2009). Analisis ini sangat bermanfaat untuk menggambarkan perubahan data pada periode tertentu atau dari waktu ke waktu. Selain itu, untuk menginformasikan pengambilan keputusan digunakan sebuah pola sebagai titik awal dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

Adapun sistem yang digunakan dalam melakukan analisis deskriptif tersebut ialah menggunakan uji statistik deskriptif. Tujuannya ialah untuk menentukan nilai rata-rata (Mean), nilai tertinggi (Max), nilai terendah (Min), dan Standar Deviasi dari masing-masing variabel yang telah ditentukan. Penulis menggunakan SPSS versi 23 bit-64 dalam menentukan nilai-nilai tersebut.

Uji Korelasi Rank Spearman

Merupakan sebuah teknik analisis non-parametrik yang bertujuan untuk mengidentifikasi koefisien korelasi antar dua variabel di mana data-data tersebut telah disusun secara berpasangan (Ginanjar S, 2020). Adapun koefisien korelasi rank spearman merupakan suatu ukuran yang mendeskripsikan hubungan antar variabel di mana secara

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

statistik akan dinilai besarnya lewat koefisien tersebut dan secara teoritis akan mendukung uji tersebut.

Adapun dasar pengambilan keputusan ketika menggunakan uji korelasi rank spearman adalah:

- Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka berkorelasi
- Apabila nilai signifikansi > 0.05 maka tidak berkorelasi

Kemudian Sugiyono (2014) menjelaskan tingkat hubungan dalam analisis korelasi rank spearman adalah sebagai berikut:

- 0.00 – 0.25 maka korelasi sangat lemah;
- 0.26 – 0.50 maka korelasi cukup;
- 0.51 – 0.75 maka korelasi kuat;
- 0.76 – 0.99 maka korelasi sangat kuat; dan
- 1.00 maka korelasi sempurna.

Uji Hipotesis Penelitian

Sejatinya, uji statistik terbagi menjadi dua, yaitu uji statistik parametrik dan non-parametrik. Data yang terdistribusi normal menggunakan uji statistik parametrik, begitu sebaliknya untuk data yang tidak terdistribusi normal (Priyatno (2013)). Uji statistik non-parametrik hanya bisa digunakan untuk menguji variabel yang diukur dan disusun memakai skala ordinal. Di mana semakin tinggi nilai yang terlihat maka semakin besar pengaruh terhadap variabel lainnya (Ghozali, 2009).

Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji *K Related Sample Test* yang merupakan suatu analisis varian terhadap pengukuran yang terjadi secara berulang (Ghozali, 2009). Uji ini sangat tepat apabila dipakai terhadap sampel kecil bersama dengan tipenya yaitu nominal dan ordinal

Menurut Ghozali (2009), terdapat dua jenis uji populer dalam uji *K Related Sample Test*, yaitu:

a) Uji Friedman

Merupakan perpanjangan dari uji Wilcoxon yang menyertakan lebih dari dua variabel yang saling memiliki keterkaitan. Uji ini berguna untuk menentukan apakah beberapa faktor yang digabungkan saling mempengaruhi.

b) Kendall's W

Merupakan uji yang memiliki persamaan dengan uji Friedman. Tujuan dari uji ini ialah untuk menguatkan dalam pengujian hipotesis yang akan diteliti. Adapun pedoman uji Kendall's W sebagai berikut:

- Apabila nilai Sig. (2-tailed) < 0.05 maka ada hubungan secara signifikan;
- Apabila nilai Sig. (2-tailed) > 0.05 maka tidak ada hubungan secara signifikan.

Kemudian koefisien korelasi pada uji Kendall's W ini adalah sebagai berikut:

- 0,00 – 0,25 maka hubungan sangat lemah;
- 0,26 – 0,50 maka hubungan cukup kuat;
- 0,51 – 0,75 maka hubungan kuat; dan
- 0,76 – 1,00 maka hubungan sangat kuat.

Dikarenakan pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel, maka Uji Friedman tidak digunakan dan hanya menggunakan Uji Kendall's W.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah guna untuk kepentingan orang pribadi maupun badan, di mana objeknya sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu retribusi atas jasa umum, retribusi atas jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Pemungutan dilakukan dengan cara menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan juga bisa menggunakan dokumen yang disetarakan. Penagihan retribusi dapat bersifat memaksa apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila hal demikian terjadi maka akan dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya. Tagihan yang kurang bayar maupun terhutang akan diminta dengan menyerahkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pada penelitian ini, penulis memakai data retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan berupa data

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

sekunder pada tahun 2014-2023. Adapun rasio retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Rasio Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (2014-2023)

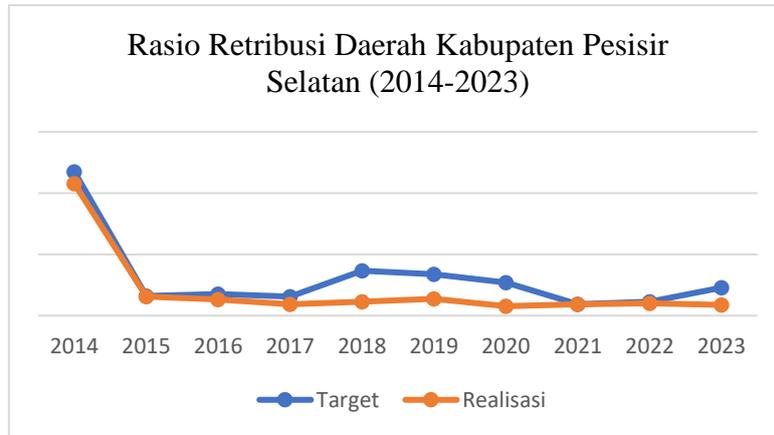
Tahun	Target (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)	Rasio Efektivitas (%)
2014	46.991.957,38	43.132.513,94	91,78%
2015	6.429.068,00	6.195.033,27	96,35%
2016	7.053.756,00	5.315.801,10	72,8%
2017	6.248.364,00	3.739.647,5	58,17%
2018	14.707.948,3	4.552.508,12	30,95%
2019	13.505.569,32	5.517.315,65	40,85%
2020	10.793.229,39	3.096.510,27	28,6%
2021	3.746.914,15	3.686.867,31	98,39%
2022	4.527.044,25	3.990.134,63	88,13%
2023	9.164.490,66	3.541.700,38	38,64%

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui rasio retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuatif dan tidak terdistribusi normal. Pada tahun 2015, target retribusi berada pada angka yang sangat jauh jika dibandingkan dengan target di tahun sebelumnya, kendatipun realisasi retribusi tidak terlalu jauh dari angka yang ditargetkan di tiap tahunnya. Namun realisasi hingga tahun 2020 mengalami penurunan, hingga mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021.

Berikut grafik target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam 10 tahun terakhir:

Gambar 4.1 Grafik Rasio Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2014-2023



Sumber: Diolah oleh Penulis

Pada gambar 4.2 di atas, penurunan drastis retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan terjadi pada tahun 2015. Kemudian diikuti dengan grafik yang fluktuatif hingga tahun 2023.

Deskripsi Pendapatan Asli Daerah

Tiap pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mencari dan menggali potensi sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dengan melakukan segala usaha untuk meningkatkan PAD. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa mengerjakan kewajiban pemerintah dan melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dengan mandiri serta dengan semata-mata untuk tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder mengenai PAD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2023. Untuk menghitung rasio PAD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 4.2 Rasio PAD Kabupaten Pesisir Selatan (2014-2023)

Tahun	Target (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)	Rasio Efektivitas (%)
2014	81.945.822,13	86.699.821,74	105,8%
2015	426.662.085,24	447.019.457,66	104,77%
2016	111.662.402,22	118.915.294,63	106,49%

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

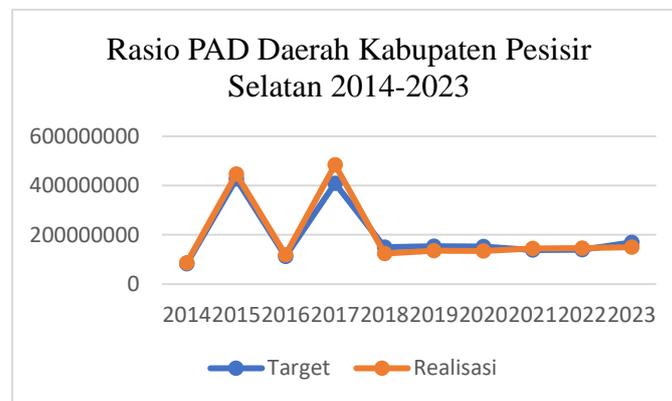
2017	409.487.625,30	484.262.826,25	118,26%
2018	150.064.411,84	123.745.891,51	82,46%
2019	153.941.080,20	135.032.864,84	87,71%
2020	152.636.474,69	133.652.411,81	87,56%
2021	138.055.967,09	144.968.542,55	105%
2022	139.571.499,73	145.678.296,97	104,37%
2023	168.770.858,22	150.231.726,53	89,01%

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa rasio PAD Kabupaten Pesisir Selatan dalam 10 tahun terakhir umumnya selalu mencapai target atau berada di atas 100%, tetapi pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan yang tidak terlalu drastis. Kemudian mengalami kenaikan kembali hingga tahun 2022 dan turun kembali pada tahun 2023. Hal tersebut membuat data PAD Kabupaten Pesisir Selatan terdistribusi dengan normal karena rasionya yang tidak jauh dari nilai rata-rata.

Berikut grafik target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam 10 tahun terakhir:

Gambar 4.2 Grafik Rasio PAD Kabupaten Pesisir Selatan 2014-2023



Sumber: Diolah oleh Penulis

Pada gambar 4.3 di atas, diketahui bahwa pada empat tahun pertama terjadi kenaikan dan penurunan yang drastis terhadap target dan realisasi PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut disebabkan karena ada dan tidak adanya penerimaan lain-lain yang sah. Faktor tersebut yang membuat grafik PAD menjadi tajam seperti yang terlihat pada

gambar. Kemudian pada tahun 2018-2023 target dan realisasi PAD tidak jauh dari nilai rata-rata dan data sudah terdistribusi secara normal.

Analisis Deskriptif

Ketika melakukan analisis deskriptif, variabel perlu dilakukan untuk mencari dan menemukan gambaran data secara umum seperti rata-rata (Mean), nilai tertinggi (Max), nilai terendah (Min), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang dalam hal ini ialah Retribusi Daerah (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan menggunakan uji statistik deskriptif. Berikut hasil dari uji deskriptif yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Retribusi Daerah	10	3096510.27	43132513.94	8276803.2170	12287267.44035
PAD	10	86699821.74	484262826.25	197020713.44	142999796.0953
Valid N (listwise)	10			90	9

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS versi 23 64-bit

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat kita ketahui distribusi data yang telah diperoleh melalui pengujian menggunakan aplikasi SPSS versi 23 64-bit sebagai berikut:

1. Variabel Retribusi Daerah (X1) dari hasil pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar Rp3.096.510,27, nilai maksimum sebesar Rp43.132.513,94, nilai rata-rata sebesar Rp8.276.803,21, dan Standar deviasi sebesar Rp12.287.267,44.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dari hasil pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar Rp86.699.821,74, nilai maksimum sebesar Rp484.262.826,25, nilai rata-rata sebesar Rp197.020.713,44, dan standar deviasi sebesar Rp142.999.796,4.

Uji Korelasi Rank Spearman

Dalam melakukan pengujian hipotesis, penulis menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman (r_s). Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

variabel independen yang variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien korelasi *Rank Spearman* dapat disajikan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman

Correlations

			Retribusi Daerah	PAD
Spearman's rho	Retribusi Daerah	Correlation	1.000	-.321
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.	.365
		N	10	10
	PAD	Correlation	-.321	1.000
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.365	.
		N	10	10

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS versi 23 64-bit

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,365 karena nilai Sig. (2-tailed) > 0.05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

Berdasarkan output SPSS di atas, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar -0.321 yang artinya tingkat kekuatan korelasi/hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah hubungan yang cukup lemah.

Uji Hipotesis Penelitian (Uji Kendall's W)

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan Uji Kendall's sebagai teknik analisis data. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara retribusi daerah dengan PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun hasil Uji Kendall's W dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Kendall's W

Correlations

			Retribusi Daerah	PAD
Kendall's tau_b	Retribusi Daerah	Correlation	1.000	-.244
		Coefficient		
	Sig. (2-tailed)	.	.325	
	N	10	10	
	PAD	Correlation	-.244	1.000
		Coefficient		
	Sig. (2-tailed)	.325	.	
	N	10	10	

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS versi 23 64-bit

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) dengan nilai 0,325, maka variabel retribusi daerah tidak terdapat hubungan yang relevan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian nilai koefisien korelasi bernilai negatif -0,244 maka diketahui bahwa korelasi kedua variabel tidak searah yang artinya jika retribusi daerah naik atau turun maka tidak berpengaruh terhadap realisasi PAD Kabupaten Pesisir Selatan dan juga koefisien korelasi mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang sangat lemah karena angka koefisien berada di bawah 0,25.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang sudah penulis laksanakan, maka beberapa kesimpulan yang dapat penulis tarik di antaranya:

1. Berdasarkan analisis deskriptif, persentase sumbangan retribusi daerah atas PAD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2023 sebesar 4,2%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah tidak terlalu besar terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Begitu juga dengan retribusi pariwisata yang merupakan komponen penyusun retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan, akan lebih kecil kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan.

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

2. Berdasarkan pengujian korelasi rank spearman, variabel retribusi daerah tidak berdampak relevan terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut berbanding lurus dengan rasio antara realisasi dengan target PAD Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di bawah 100% untuk setiap tahunnya. Begitu juga dengan pengaruh retribusi sektor pariwisata yang menjadi bagian dari retribusi daerah.
3. Berdasarkan uji Kendall's W, variabel retribusi daerah tidak berdampak signifikan terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki hubungan yang sangat lemah.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan sesudah melaksanakan penelitian ini ialah:

1. Bagi penelitian selanjutnya
Diharapkan mampu melaksanakan penelitian dan penelaahan dalam cakupan yang besar dari sumber-sumber PAD atau variabel lainnya yang berkaitan dengan pendapan daerah. Karena daerah merupakan wilayah otonom yang diberikan kekuasaan untuk mengurus wilayahnya sendiri, sehingga dengan dilakukan peneltian terhadap daerah dimungkinkan akan menemukan potensi-potensi yang banyak sehingga dapat memajukan daerah itu sendiri serta memberikan hasil dan prestasi yang diinginkan. Selain itu, mampu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengolah dan mengatur PAD maupun sumber pendapatan lainnya.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
 - a. Diharapkan mampu mengelola arsip data-data penting terkait keuangan daerahnya sendiri. Arsip memiliki peranan penting karena menjadi informasi bagi pimpinan dalam menentukan keputusan serta merumuskan kebijakan daerahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur kerja yang lebih baik dan berkualitas dalam mengelola kearsipan dan berkas-berkas daerah.
 - b. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menggali lebih dalam lagi mengenai kapasitas dan kesediaan sumber daya yang terdapat pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sangat disayangkan apabila potensi yang besar namun penerimaan yang rendah tidak akan membuat kemajuan di wilayah itu sendiri. Potensi retribusi pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan

sangatlah besar, namun realitanya yang terjadi di lapangan tidak sepadan dengan ekspektasi yang diinginkan. Maka dari itu, diperlukan penyuluhan dan efisiensi pemungutan yang berkualitas dalam memaksimalkan penerimaan daerah dari retribusi pariwisata ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Ani. (2021). Pengaruh Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Utara. Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo, 1(1), 1–16.
- Dahris, P. (2020). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo, 1(1), 1–10.
- Ernawati. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Aceh Barat. www.utu.ac.id
- Firdausy, Carunia Mulya. (2014). Efektivitas Dan Akuntabilitas Dana Perimbangan Dan Peranannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yogyakarta.
- Gemon, Krismon (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. Kusufi, Muhammad Syam. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hannini, Alfariz. (2018). Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Pariwisata) Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012-2017. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- J Maleong, Lexy. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit: Andi.
- Rahmayani. (2021). Skripsi Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

- Rizal, Mohammad. (2023). Pengaruh Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012–2021. Bandung: Universitas Sangga Buana.
- Siahaan, Marihot P. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Baldric. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua) Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit.
- Srinofril, W., & Ananda, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. 2(1), 55–68.
<https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1053>.
- Sugianto. (2010). Model-Model Inovatif. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.